

LAPORAN AKHIR KEGIATAN

PENDAMPINGAN TEKNOLOGI DAN SUPERVISI
PELAKSANAAN PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS
PERDESAAN (PUAP) DI PROVINSI ACEH



Oleh :
Yufniati ZA
Idawanni
Elviwirda
Cut Nina Herlina
Rosdewani
Juardi
Nuraida Fitri

BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN NAD
BALAI BESAR PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2010

KATA PENGANTAR

Laporan Tahunan ini disusun dari hasil pelaksanaan Pendampingan Teknologi dan Supervisi Pelaksanaan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) di provinsi Aceh. Kegiatan PUAP yang dilaksanakan berdasarkan Surat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 1395/WPB.13/Kp.0521/ 2010, yang di SKPA kan oleh Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (B2P2TP) kepada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Nanggroe Aceh Darussalam.

Laporan Tahunan ini menyajikan hasil kegiatan tentang : 1). Penyaluran biaya operasional Penyelia Mitra Tani (BOP PMT); 2). Pengembangan Gapoktan; 3) Pendampingan Teknologi dan Suprvisi pelaksanaan Program PUAP yang meliputi : Koordinasi, supervise, verifikasi dokumen pengajuan BLM-PUAP dan kesekretariatan, B). Fasilitasi pendampingan inovasi teknologi pengembangan usaha agribisnis, C) Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia; 4) Monitoring dan Evaluasi; 5). Pelaporan

Disadari laporan tengah tahunan ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penyusun mengharap dan menerima masukan baik berupa kritik maupun saran guna perbaikan dan penyempurnaan laporan ini.

Semoga laporan ini dapat berguna dan bermanfaat adanya.

Banda Aceh, Desember 2010

PenanggungJawab Kegiatan,

Ir. Yufniati ZA
NIP. 080 069 181

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	6
1.3. Keluaran	6
II. TINJAUAN PUSTAKA	8
III. PROSEDUR	10
3.1. Ruang Lingkup	10
3.2. Tahapan Kegiatan	17
3.3. Pendekatan	19
3.4. Waktu dan tempat	21
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	27
4.1. Penyaluran Biaya Operasional PMT	27
4.2. Verifikasi Dokumen RUB dan Administrasi Pendukung Lain	27
4.3. Pengembangan Gapoktan.....	28
4.4. Pendampingan Teknologi dan Supervisi Pelaksanaan Program PUAP.....	30
V. PENUTUP	35
VI. DAFTAR PUSTAKA	37

I. PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) merupakan program terobosan Departemen Pertanian untuk penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja di pedesaan, mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah, pusat dan daerah serta antar sub sector.

Pengembangan Usaha Agribisnis di Pedesaan adalah bagian dari pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri) melalui bantuan modal usaha dalam menumbuh kembangkan usaha agribisnis sesuai dengan potensi pertanian desa sasaran. Program PUAP dilaksanakan oleh petani (pemilik, penggarap), buruh tani dan rumah tangga tani miskin melalui koordinasi Gapoktan sebagai lembaga yang dimiliki dan dikelola oleh petani. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2007 jumlah penduduk miskin tercatat 37,2 juta jiwa dari jumlah penduduk Indonesia 220 juta jiwa sekitar 63,4% dari penduduk miskin (23,58 juta jiwa) berada dipedesaan dengan mata pencarian utama disektor pertanian.

Kemiskinan dipedesaan merupakan masalah pokok nasional yang penanggulangannya tidak dapat ditunda dan harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan nasional. Oleh karena itu pembangunan ekonomi nasional berbasis pertanian dipedesaan secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada pengurangan penduduk miskin. Permasalahan mendasar yang dialami oleh petani adalah kurangnya akses permodalan, pasar dan teknologi serta organisasi tani yang masih lemah. Dalam rangka penanggulangan petani kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja dipedesaan, Bapak Presiden RI pada tanggal 30 April 2007 di Palu Sulawesi Tengah telah mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri.

Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2007 tercatat 37,2 juta jiwa (BPS 2007) dan sekitar 63,4% berada di perdesaan dengan mata pencaharian utama di sektor pertanian yang 80% nya memiliki luas lahan di bawah 0,3 hektar

(Departemen Pertanian 2009). Permasalahan mendasar sektor pertanian di perdesaan selain pemilikan lahan yang relatif sempit adalah terbatasnya akses petani kepada sumber permodalan, pasar, teknologi, dan organisasi tani yang masih lemah, sehingga mengakibatkan lambatnya perkembangan usaha agribisnis sebagai penggerak ekonomi perdesaan. Kemiskinan di perdesaan merupakan masalah utama nasional yang penanggulangannya tidak dapat ditunda dan harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah telah menetapkan Program Pembangunan Jangka Menengah (2005 – 2009) yang fokus pada pembangunan pertanian perdesaan. Salah satunya ditempuh melalui pendekatan pengembangan usaha agribisnis dan memperkuat kelembagaan pertanian di perdesaan.

Dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja di perdesaan tersebut, Departemen Pertanian melaksanakan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-M) yang dicanangkan Presiden RI pada tanggal 30 April 2007 di Palu, Sulawesi Tengah. Tujuan PUAP untuk (a) mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui penumbuhan dan pengembangan kegiatan usaha agribisnis sesuai dengan potensi wilayah; (b) meningkatkan kemampuan pelaku usaha agribisnis, pengurus Gapoktan, Penyuluh dan Penyelia Mitra Tani (PMT); (c) memberdayakan kelembagaan petani dan ekonomi perdesaan untuk pengembangan kegiatan agribisnis; (d) meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi petani menjadi jejaring atau mitra lembaga keuangan dalam rangka akses ke permodalan. Program ini pada intinya merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat agar mampu menolong dirinya sendiri melalui peningkatan kemampuannya untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang usaha agribisnis di pedesaan. Program dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat ini harus didukung dengan ketersediaan modal usaha selain inovasi pertanian, karena kenyataan menunjukkan bahwa banyak inovasi pertanian yang dinyatakan dan diminati petani tidak dapat diadopsi karena faktor keterbatasan modal dan kesulitan mengakses lembaga permodalan (Kushartanti, dkk, 2005).

Untuk pelaksanaan PUAP di Departemen Pertanian Menteri Pertanian membentuk tim pelaksana Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan melalui Peraturan Menteri Pertanian (PERMENTAN) Nomor 16/Permentan/OT.140/2008, tanggal 11 Pebruari 2008 tentang pedoman umum PUAP, dimana pada BAB V organisasi pelaksanaan PUAP tingkat provinsi Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) sebagai sekretaris tim pelaksana. Adapun ruang lingkup peran dan tanggung jawab BPTP dalam pelaksanaan PUAP selain sebagai sekretaris tim pelaksana PUAP provinsi juga sebagai koordinator dan fasilitasi Biaya Operasi Penyelia Mitra Tani (BOP PMT), supervisi PUAP dan apresiasi anggota gapoktan.

Program PUAP merupakan salah satu alternatif upaya untuk menjawab dan memenuhi kebutuhan petani dalam permodalan petani di Indonesia, karena itulah salah satu *entry point* yang dilakukan dalam program PUAP adalah memberikan bantuan penguatan modal sebesar 100 juta rupiah per desa yang disalurkan melalui Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) untuk pengembangan dan peningkatan usaha agribisnis. Upaya pengembangan usaha agribisnis tersebut perlu memperhatikan dan menekankan keberpihakan pada petani sebagai pelaku utama kegiatan. Menurut Slamet (1994), program yang diterapkan untuk memberdayakan masyarakat pedesaan harus bersifat partisipatif, dengan alasan agar sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masyarakat.

Belajar dari pengalaman, salah satu faktor kunci keberhasilan program yang sudah diidentifikasi adalah melakukan pembinaan, pendampingan dan penyeliaan yang sistematis dan intensif. Apabila tidak dilakukan pendampingan, pelaksanaan kegiatan pada umumnya tidak fokus, tidak ada rasa memiliki, dilaksanakan apa adanya, dan rawan penyimpangan (Badan Litbang Pertanian, 2007). Penanganan tersebut harus dilakukan semua pihak terkait secara bersama, berkelanjutan, dan terkoordinasi. Dalam rangka kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan PUAP, Departemen Pertanian telah menyusun struktur organisasi, dan mekanisme pembinaan, pengendalian, pendampingan pelaksanaan PUAP dari tingkat pusat sampai dengan tingkat desa dalam Pedoman Umum Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor :

16/Permentan/TU.140/2/2008 yang kemudian diperbaharui dengan Nomor 16/Permentan/OT.140/3/2009. Dalam Pedoman Umum (Pedum) tersebut, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) menjadi bagian dari Tim Pelaksana PUAP Provinsi yang turut serta melaksanakan pembinaan, dan pengendalian terhadap pelaksanaan PUAP di lapangan. Di samping tugas-tugas administratif yang tersebut pada Pedum tersebut, BPTP sebagai lembaga penyedia inovasi teknologi pertanian diharapkan berperan aktif dalam pendampingan dan pemenuhan kebutuhan inovasi teknologi pertanian yang diperlukan pelaksana di lapangan.

Dalam pelaksanaan program perlu dilakukan pembinaan, dan pengendalian yang intensif terhadap pelaksana PUAP di lapangan yaitu Gapoktan, Penyuluh Pendamping, dan PMT. BPTP sebagai bagian dari Tim PUAP Provinsi mempunyai tugas-tugas sebagai berikut (1) melakukan koordinasi dengan PMT terkait dengan pelaksanaan tugas PMT; (2) memfasilitasi BOP PMT sesuai dengan ketentuan; (3) melakukan supervisi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan tugas PMT; (4) mengkoordinasikan dan menyusun laporan pelaksanaan tugas PMT secara berkala (minimal 3 bulan sekali) atau sewaktu-waktu jika diperlukan; (5) memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi PUAP; (6) monitoring peningkatan fungsi kelembagaan ekonomi Gapoktan; (7) melaksanakan fungsi kesekretariatan PUAP di tingkat provinsi; (8) melakukan supervisi PUAP di wilayah kerjanya; (9) memfasilitasi penyiapan teknologi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan PUAP.

Berdasarkan struktur organisasi pembinaan dan pengendalian program PUAP dalam Pedoman Umum Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) (2009), BPTP berhubungan langsung dengan petugas Penyelia Mitra Tani (PMT). PMT adalah individu yang memiliki keahlian di bidang keuangan mikro yang direkrut Departemen Pertanian untuk melakukan supervisi dan advokasi kepada Penyuluh Pendamping dan pengelola Gapoktan dalam pelaksanaan dan pengembangan PUAP di lapangan (Departemen Pertanian 2008). Dengan demikian, PMT mempunyai mobilitas yang tinggi dalam pelaksanaan tugas-tugasnya yaitu mendampingi Penyuluh Pendamping dan Gapoktan dalam wilayah kerjanya di kabupaten/ kota. Agar tugas dan fungsi PMT dapat dilaksanakan optimal, maka diperlukan biaya

operasional selain honorarium yang diperoleh langsung dari Biro Organisasi dan Kepegawaian Departemen Pertanian.

Adapun lokasi PUAP di Provinsi Aceh difokuskan pada 10.000 desa miskin/tertinggal yang memiliki potensi pertanian, tersebar pada 33 provinsi, 379 kabupaten/kota dan 1834 kecamatan miskin. Untuk tahun 2008 Provinsi Aceh mendapat porsi/kuota 600 desa miskin yang total dana BLM sebanyak Rp. 60 milyar (Rp. 100.000.000/desa miskin/gapoktan). Pada tahun 2009 mendapat tambahan kuota sebanyak 275 desa dengan total dana 27,5 miliar.

Provinsi Aceh merupakan daerah yang luasnya 58.375,63 km², dengan jumlah penduduk sebanyak 4.233.833 jiwa terdiri atas 2.101.415 laki-laki dan 2.122.418 perempuan dimana kepadatan penduduk mencapai 72 orang/km² (Aceh dalam angka, 2008). Data BAPPEDA provinsi Aceh tahun 2008, tingkat kemiskinan sebesar 28,28% dari jumlah penduduk 4.031,59 jiwa pada tahun 2006, pada tahun 2007 mengalami penurunan tingkat kemiskinan sebesar 26, 65% dari jumlah penduduk 4.233.833 jiwa, selanjutnya pada tahun 2008 kondisi Maret turun menjadi 23,53%.

1.2. Tujuan

- Memfasilitasi administrasi BOP PMT sebanyak 44 orang
- Memfasilitasi pendampingan tata cara dan administrasi pelaksanaan Program PUAP 2010
- Memfasilitasi kegiatan pengembangan kelembagaan Gapoktan dan LKMA di Desa yang berintegrasi dengan Prima Tani, PSDS, SL-PTT dengan jumlah seluruhnya 143 desa.
- Memfasilitasi pendampingan teknologi agribisnis di lokasi PUAP tahun 2008 dan 2009 yang berintegrasi dengan program Prima Tani, PSDS, dan SL-PTT dengan jumlah seluruhnya 143 desa.
- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program PUAP
- Mendistribusikan materi diseminasi yang terdiri dari : 1). 2 judul brosur sebanyak 1.000 eksemplar (Teknologi Budi daya Cabe Merah dan PTT

Kacang Tanah), 2). 4 judul leaflet sebanyak 3.000 eksemplar (Musuh Alami, Membuat Kompos, Teknologi Pupuk Cair dan Pengendalian Keong Mas) Memfasilitasi penyediaan materi diseminasi 4 judul 2.000 eksemplar.

1.3 Keluaran

- Terfasilitasi administrasi Biaya Operasional bagi 44 orang Penyelia Mitra Tani (BOP-PMT) PUAP Aceh sesuai dengan PEDUM.
- Terfasilitasinya pendampingan dan tatacara dan administrasi pelaksanaan Program PUAP tahun 2010.
- Terfasilitasinya kegiatan pengembangan kelembagaan Gapoktan dan LKMA di Desa yang berintegrasi dengan Prima Tani, PSDS, SL-PTT dengan jumlah seluruhnya 143 desa.
- Terfasilitasinya pendampingan teknologi agribisnis di lokasi PUAP tahun 2008 dan 2009 yang berintegrasi dengan program Prima Tani, PSDS, dan SL-PTT dengan jumlah seluruhnya 143 desa.
- Terevaluasinya pelaksanaan program PUAP serta dampaknya terhadap pendapatan petani.
- Terdistribusinya materi diseminasi yang terdiri dari : 1). 2 judul brosur sebanyak 1.000 eksemplar (Teknologi Budi daya Cabe Merah dan PTT Kacang Tanah), 2). 4 judul leaflet sebanyak 3.000 eksemplar (Musuh Alami, Membuat Kompos, Teknologi Pupuk Cair dan Pengendalian Keong Mas)

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pembangunan Pertanian berkelanjutan merupakan keniscayaan dalam pemenuhan kebutuhan pangan, memperluas lapangan kerja dan lapangan berusaha, mengentaskan masyarakat dari kemiskinan.

Program PUAP dilaksanakan oleh petani (pemilik atau penggarap), buruhtani dan rumah tangga tani miskin di perdesaan melalui koordinasi Gapoktan sebagai lembaga yang dimiliki dan dikelola oleh petani. Puap dilaksanakan secara integrasi dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-M) yang dicanangkan oleh Presiden RI pada tanggal 30 April di Palu Sulawesi Tengah (Anonymous, 2009).

Pelaksanaan PUAP mengacu kepada pola dasar yang ditetapkan dalam PERMENTAN Nomor 16/Permentan/OT.140/3/2009 yaitu pendidikan dan latihan untuk pengembangan usaha, pendampingan dan pemberian fasilitas bantuan modal usaha petani yang dikoordinasikan oleh Gapoktan. Untuk membangun kemandirian Gapoktan dalam pelaksanaan PUAP perlu didampingi oleh Penyuluh Pendamping dan Penyelia Mitra Tani sehingga dapat mengoptimalkan pemanfaatan dana sesuai dengan tujuan PUAP (Anonymous, 2009)..

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2007 jumlah penduduk miskin tercatat 37,2 juta jiwa dari jumlah penduduk Indonesia 220 juta jiwa sekitar 63,4% dari penduduk miskin (23,58 juta jiwa) berada dipedesaan dengan mata pencarian utama disektor pertanian.

Kemiskinan dipedesaan merupakan masalah pokok nasional yang penanggulangannya tidak dapat ditunda dan harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan nasional. Oleh karena itu pembangunan ekonomi nasional berbasis pertanian dipedesaan secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada pengurangan penduduk miskin.

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan daerah yang luasnya 58.375,63 km², dengan jumlah penduduk sebanyak 4.233.833 jiwa terdiri atas 2.101.415 laki-laki dan 2.122.418 perempuan dimana kepadatan penduduk mencapai

72 orang/km² (Aceh dalam angka, 2008).

Berdasarkan data BAPPEDA provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tahun 2008, tingkat kemiskinan sebesar 28,28% dari jumlah penduduk 4.031,59 jiwa pada tahun 2006, pada tahun 2007 mengalami penurunan tingkat kemiskinan sebesar 26,65% dari jumlah penduduk 4.233.833 jiwa, selanjutnya pada tahun 2008 kondisi Maret turun menjadi 23,53%.

Adapun kriteria Gapoktan penerima bantuan modal PUAP adalah antara lain :a)Memeiliki SDM yang mampu mengelola usaha agribisnis; b) Mempunyai struktur kepeguruan yang aktif; dan c) dikukuhkan dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota; dan d) Dimiliki dan dikelola oleh petani (Anonymous, 2009)..

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertanian telah memberikan banyak perubahan di dalam masyarakat. Perubahan-perubahan tersebut disebabkan oleh adanya perubahan perilaku petani yang sengaja dikembangkan untuk mendapatkan produktivitas yang tinggi. Suatu paket teknologi pertanian tidak akan ada manfaatnya bagi petani jika teknologi tersebut tidak dikomunikasikan kedalam alam masyarakat sebagai petani pengguna. Peranan komunikasi sangat penting dalam menyampaikan suatu maksud agar suatu paket teknologi di transfer ke masyarakat tani. Berhasil atau gagalnya suatu paket teknologi di transfer ke masyarakat tani sangat dipengaruhi oleh adanya informasi yang diterima oleh petani pada saat yang tepat (Azis Amin, 1992).

III. PROSEDUR

3.1. Ruang Lingkup

Pendampingan Pelaksanaan PUAP pada tahun 2010 direncanakan meliputi :

3.1.1. Biaya Operasional (BOP) Penyelia Mitra Tani (PMT) :

- ❖ BOP merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memfasilitasi operasional PMT baik PMT tahun 2008, 2009, maupun 2010 dalam melaksanakan tugas-tugasnya di lapangan. Sasaran dari kegiatan ini adalah (i) terdistribusikannya biaya operasional penyeliaan (BOP) PMT sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (ii) termonitornya pelaksanaan tugas dan pelaporan berkala PMT.
- ❖ Kegiatan ini berupa pembayaran biaya operasional penyeliaan PMT yang antara lain digunakan untuk biaya transportasi lokal dan transport dari lokasi wilayah kerja PMT ke BPTP.
- ❖ Jumlah BOP yang ditetapkan sebesar Rp 900.000 per bulan dan pembiayaan lain-lain yang diperlukan misal fotokopi, pengiriman surat, ATK, dan lain-lain rata-rata sebesar Rp. 200.000,- per bulan.
- ❖ Biaya operasional disediakan untuk PMT se Provinsi Aceh dengan rincian sebagai berikut : (i) PMT rekrutment tahun 2008 sebanyak 15 orang; (ii) PMT pengganti antar waktu (PAW) tahun 2008 sebanyak 3 orang, (iii) PMT rekrutment 2009 sebanyak 30 orang; dan PMT rekrutment tahun 2010.
- ❖ Pembayaran akan dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja antara Kepala BPTP Aceh dan PMT yang antara lain menyebutkan bahwa pembayaran BOP akan dilakukan setiap bulan setelah PMT membuat rencana kegiatan PMT bulan berjalan dan laporan hasil pekerjaan bulan lalu pada setiap awal bulan selambat-lambatnya tanggal 8 (delapan). Sehubungan dengan itu, agar rencana kegiatan dan laporan hasil pekerjaan PMT dapat diserahkan tepat waktu, setiap bulan akan diselenggarakan pertemuan evaluasi laporan PMT dan pada setiap triwulan akan diselenggarakan pula

pertemuan untuk penyusunan laporan triwulanan PMT baik manual maupun melalui *e-form*.

3.1.2. Pengembangan Gapoktan Lokasi PUAP :

- Kegiatan Pengembangan Gapoktan lokasi PUAP direncanakan pelaksanaannya dalam bentuk Apresiasi yang bertujuan untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan, dan ketrampilan pelaksana PUAP di lapangan yaitu pengurus Gapoktan dan Penyuluh Pendamping tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan agribisnis, dan pemberdayaan Gapoktan.
- Apresiasi akan dilaksanakan dengan metoda komunikasi tatap muka, diskusi dan partisipatif. Kegiatan ini pelaksanaannya direncanakan berkoordinasi dengan Tim pelatihan/pembekalan PUAP dari Badan Pengembangan SDM Pertanian, dan bekerjasama dengan Tim Pelaksana PUAP Kabupaten/ Kota se Provinsi Aceh.
- Sasaran kegiatan Apresiasi adalah pengurus Gapoktan dan Penyuluh Pendamping yang ditetapkan oleh Bupati/ Walikota setempat lokasi PUAP lokasi tahun 2010.
- Kegiatan direncanakan pelaksanaannya 2 (dua) kali untuk setiap kabupaten/ kota dengan topik materi sebagai berikut : (1) pengajuan BLM-PUAP bagi pengurus Gapoktan; (2) manajemen keuangan unit/ lembaga keuangan mikro pada Gapoktan yang diutamakan untuk calon manajer unit/ lembaga keuangan mikro pada Gapoktan.

3.1.3. Pendampingan Teknologi dan Supervisi Pelaksanaan Program PUAP :

Kegiatan Pendampingan Teknologi dan Supervisi Pelaksanaan PUAP diselenggarakan untuk memfasilitasi upaya BPTP Aceh dalam mendukung dan mempercepat keberhasilan tujuan PUAP berdasarkan tupoksi BPTP. Kegiatan ini akan dilaksanakan di lokasi PUAP tahun 2008, 2009, dan 2010. Ruang lingkup kegiatan meliputi :

A. Koordinasi, Supervisi, Verifikasi dokumen pengajuan BLM-PUAP, dan Kesekretariatan:

- ❖ Kegiatan koordinasi bertujuan untuk (i) meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUAP antar BPTP, Tim Pelaksana PUAP baik tingkat pusat, provinsi maupun tingkat kabupaten/ kota dan PMT di Jawa Tengah; (ii) menyamakan visi dan persepsi pelaksanaan PUAP di Jawa Tengah; (iii) mengidentifikasi, merumuskan dan menyelesaikan permasalahan dalam persiapan dan pelaksanaan PUAP di lapangan. Sasaran kegiatan adalah terkoordinasikannya kegiatan PUAP baik antar BPTP, dengan tingkat pusat, provinsi, PMT maupun tingkat kabupaten/ kota pelaksana PUAP. Kegiatan akan dilaksanakan dalam bentuk pertemuan baik pada tahap persiapan maupun pelaksanaan. Pada tahap persiapan antara lain akan diselenggarakan dengan materi utama sosialisasi program PUAP tahun 2010 kepada Tim PUAP kabupaten/ kota se Provinsi Aceh, di samping pertemuan koordinasi lainnya di beberapa kabupaten/ kota pelaksana PUAP untuk menyelesaikan permasalahan yang diperkirakan dapat menghambat kelancaran pelaksanaan kegiatan.
- ❖ Verifikasi dokumen pengajuan BLM-PUAP diselenggarakan bertujuan untuk memverifikasi dokumen pengajuan BLM-PUAP dan menyusun beberapa Petunjuk Teknis yang diperlukan dalam pelaksanaan PUAP. Dalam Pedoman Umum PUAP disebutkan bahwa RUB dan dokumen administrasi pendukung pengajuan BLM-PUAP dari Gapoktan diteliti dan diverifikasi oleh Tim PUAP Provinsi. BPTP Aceh sebagai Sekretaris Tim Pelaksana ikut serta melaksanakan tugas tersebut yang direncanakan dilaksanakan dengan konsinyasi agar dapat diselesaikan dengan cepat. Sasaran kegiatan adalah terverifikasinya dokumen pengajuan BLM-PUAP dari Gapoktan se Aceh tahun 2010, dan tersusunnya Petunjuk Teknis yang berhubungan dengan pelaksanaan PUAP di lapangan.

- ❖ Kesekretariatan dan pelaporan merupakan kegiatan fasilitasi tugas BPTP Aceh sebagai Sekretaris Tim Pelaksana PUAP Provinsi Aceh yang sekaligus menjadi sekretariat PUAP. Tujuan kegiatan adalah fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan dan penyusunan laporan berkala (bulanan, triwulan, tahunan/ akhir) dan sewaktu-waktu yang diperlukan. Sasaran kegiatan adalah terselenggaranya tugas-tugas kesekretariatan dengan optimal dan tersusunnya laporan tepat waktu. Kegiatan selain yang berhubungan langsung dengan kesekretariatan dan pelaporan juga penyusunan data base PUAP yang meliputi data dasar Gapoktan penerima PUAP, Penyuluh Pendamping, laporan hasil identifikasi potensi desa, data dasar desa, RUB, dan RUA/RUK.
- ❖ Supervisi dilaksanakan bertujuan untuk (i) menjaring informasi perkembangan pelaksanaan PUAP; (ii) menjaring kebutuhan inovasi teknologi di lapangan; (iii) menjaring calon Gapoktan PUAP Berprestasi dari setiap kabupaten/kota pelaksana PUAP T.A 2008 dan 2009. Sasaran kegiatan adalah (i) tersusunnya laporan perkembangan pelaksanaan PUAP; (ii) tersusunnya laporan kebutuhan inovasi teknologi dalam pengembangan usaha agribisnis; (iii) tersusunnya laporan hasil penjaringan calon Gapoktan PUAP Berprestasi di Aceh. Kegiatan supervisi pelaksanaan PUAP direncanakan pelaksanaannya untuk supervisi pelaksanaan PUAP T.A 2008 dan 2009 yang materinya diutamakan pada penjaringan Gapoktan PUAP Berprestasi dan perkembangan LKM-A/ unit keuangan mikro/ unit simpan pinjam yang mengelola dana PUAP pada Gapoktan, dan 2 untuk supervisi pelaksanaan PUAP T.A 2010 yang meliputi (i) tahap persiapan (sebelum dana PUAP diterima Gapoktan); (ii) tahap pelaksanaan yaitu pada saat dana PUAP sudah disalurkan kepada petani. Supervisi direncanakan pelaksanaannya sampai dengan tingkat desa. Supervisi di tingkat kabupaten/ kota akan dilakukan secara keseluruhan di kabupaten dan kota secara langsung maupun melalui PMT, penyuluh pendamping, dan tim teknis kabupaten/ kota. Kegiatan ini akan

dilaksanakan dengan menggunakan metode pertemuan, kunjungan, dan observasi. Supervisi terhadap Gapoktan di tingkat desa direncanakan pelaksanaannya pada beberapa desa yang akan diambil untuk contoh. Gapoktan/ desa contoh tersebut akan ditetapkan secara purposif bersama-sama dengan Tim Teknis kabupaten/ kota yang direncanakan tindak lanjutnya berupa pendampingan teknologi dari BPTP Aceh. Cakupan supervisi meliputi (1) tahapan implementasi PUAP; (2) Usaha agribisnis yang diusulkan dalam RUB; (3) pengembangan kelembagaan Gapoktan dan unit usaha otonom pengelola dana di Gapoktan; (4) dukungan inovasi dan teknologi yang diperlukan; (5) kinerja PMT; (6) kendala dan permasalahan yang terjadi; (7) langkah-langkah penyelesaian masalah.

B. Fasilitasi pendampingan inovasi teknologi pengembangan usaha agribisnis :

- Dalam upaya mendukung dan mempercepat keberhasilan tujuan PUAP, BPTP sebagai lembaga penyedia inovasi teknologi diharapkan dapat mendampingi pelaksana PUAP di lapangan khususnya Penyuluh Pendamping dan Gapoktan. Tujuan kegiatan ini adalah memfasilitasi kebutuhan inovasi teknologi yang sesuai dengan potensi wilayah. Sasaran kegiatan ini adalah terfasilitasinya inovasi teknologi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pengembangan usaha agribisnis.
- Kegiatan akan dilaksanakan dengan metoda pertemuan dalam bentuk apresiasi teknologi, pendampingan pelaksanaan usaha agribisnis di beberapa desa/ gapoktan, baik melalui melalui beberapa metode penyuluhan antara lain melalui media tercetak, elektronik, dan tatap muka;
- Apresiasi teknologi dimaksudkan untuk membekali penyuluh pendamping dengan inovasi teknologi yang dibutuhkan sesuai potensi wilayah dalam rangka mendampingi Gapoktan dalam pengembangan usaha agribisnis.

- Media cetak dan elektronik direncanakan penerbitannya dalam bentuk tercetak (brosur, leaflet, poster) dan elektronik. Materi media meliputi tanaman, peternakan, dan pengolahan hasil. Media cetak direncanakan diperbanyak masing-masing \pm 3000 exemplar dalam bentuk buku/ brosur kumpulan inovasi teknologi yang akan didistribusikan ke BPP dan desa lokasi PUAP tahun 2008, 2009, dan 2010.
- Kegiatan Diseminasi teknologi dilakukan melalui pelatihan, pembuatan demplot, distribusi leaflet, brosur dan sebagainya terutama untuk komunitas pertanian yang banyak diusahakan oleh petani peserta PUAP. Kegiatan diseminasi yang dilakukan adalah sebagai berikut : 1) Pelatihan Teknologi Usaha agribisnis bagi Penyuluh Pendamping dan Petani Peserta PUAP. 2) pembuatan demplot teknologi usaha agribisnis di kecamatan loka

C. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia :

- ❖ Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia diselenggarakan dalam upaya kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan PUAP di Aceh. Tujuan kegiatan adalah meningkatkan wawasan, pengetahuan, dan ketrampilan SDM pelaksana PUAP di Aceh baik pelaksana di BPTP Aceh maupun petugas lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan PUAP.
- ❖ Ruang lingkup kegiatan adalah (i) memfasilitasi keikutsertaan pelaksana BPTP Jawa Tengah dan pelaksana lainnya dalam berbagai forum pelatihan dan pertemuan sejenis yang berhubungan dengan PUAP; (ii) workshop *e-form* bagi PMT untuk menyelesaikan berbagai permasalahan kelancaran dan ketertiban pengiriman laporan e-form secara berkala; (iii) semiloka pengembangan usaha agribisnis sebagai forum berbagi pengalaman, sinkronisasi, dan koordinasi bagi pelaksana PUAP mulai tingkat desa samapai dengan provinsi; (iv) gelar karya PUAP Aceh yang akan dilaksanakan di Aceh dan di Jakarta; dan (v)

studi banding bagi Gapoktan penerima PUAP sebagai penghargaan dan motivasi untuk meningkatkan pelaksanaan PUAP.

3.1.4. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan untuk seluruh aspek kegiatan PUAP yang meliputi : Aspek pengembangan kelembagaan gapoktan, pengembangan usaha agribisnis, penyaluran dana BLM-PUAP, pengembangan lembaga keuangan mikro, peningkatan pendapatan petani peserta PUAP. Sedangkan Monev dilaksanakan melalui 4 kegiatan yaitu :

1. Distribusi dan pengisian form monev
2. Workshop
3. Pertemuan bulanan dengan PMT
4. Survey Lapangan

3.1.5. Pelaporan

Penulisan pelaporan merupakan bagian penting sebagai pertanggungjawaban terhadap pengelolaan keuangan negara. Laporan yang akan disampaikan terdiri dari : laporan bulanan, laporan triwulan, laporan tengah tahunan dan laporan akhir erta laporan perkembangan kegiatan apabila sewaktu-waktu diperlukan.

3.2. Tahapan Kegiatan

Pada dasarnya kegiatan pendampingan PUAP, meliputi beberapa tahapan, yaitu:

3.2.1 Penyusunan Rencana Diseminasi Hasil Pengkajian (RDHP) :

RDHP disusun berdasarkan surat Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian nomor 1735/TU.220/I.10/11/09 dan Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Anggaran PUAP di BPTP DIPA TA 2010. Selanjutnya RDHP diseminarkan di tingkat internal BPTP Aceh. Berdasarkan hasil diskusi, pembahasan dan masukan pada seminar tersebut, RDHP akan disempurnakan dan disampaikan ke Tim Teknis PUAP di BBP2TP untuk proses pengesahan.

3.2.2 Rapat tim pelaksana :

Untuk mempersiapkan kegiatan tersebut, dilaksanakan rapat/ pertemuan yang diikuti oleh anggota tim kegiatan. Beberapa hal yang akan dibahas pada pertemuan adalah: (1) penyatuan persepsi antar anggota tim dalam pelaksanaan kegiatan dan penyatuan visi serta misi terhadap tujuan dan keluaran yang ingin dicapai, (2) pembuatan pedoman pelaksanaan kegiatan (pembuatan prosedur pelaksanaan), (3) pembagian tugas tim.

3.2.3 Konsultasi dan koordinasi dengan Tim Pelaksana PUAP baik tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten :

Untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan perlu dilakukan konsultasi dan koordinasi dengan tim pelaksana PUAP. Konsultasi akan dilakukan dengan Tim Pusat selain untuk memantapkan pelaksanaan kegiatan, juga untuk penyelesaian permasalahan yang dihadapi di tingkat kabupaten/ kota dan Gapoktan pelaksana, sedangkan koordinasi dengan Tim Pelaksana tingkat provinsi dan kabupaten/ kota untuk (i) menyelaraskan kegiatan PUAP di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota (ii) mengkoordinasikan rencana pelaksanaan kegiatan.

3.3. Pendekatan

3.3.1 Pendampingan administrasi dan tata cara pelaksanaan kegiatan PUAP.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui pembuatan jukni, sosialisasi kegiatan PUAP, workshop, pengusulan desa dan gapoktan, pembuatan dan verifikasi RUB, dan dokumen lainnya.

Materi pendampingan meliputi :

- ✚ Pembuatan juknis
- ✚ Sosialisasi juknis
- ✚ Penyelenggaraan workshop mengenai pengusulan desa dan gapoktan
- ✚ Pembekalan pembuatan RUB dan dokumen lainnya, pengisian form dan verifikasi RUB.

3.3.2 Pendampingan kelembagaan gapoktan

Dilaksanakan melalui kegiatan pelatihan disetiap dengan nara sumber dari BPTP, tim teknis Kabupaten/kota, PMT dan penyuluh TOT, materi yang akan disampaikan terdiri dari pengelolaan LKMA, pembukuan dan administrasi keuangan.

3.3.3. Pendampingan teknologi agribisnis

Dilaksanakan oleh BPTP melalui kegiatan pelatihan untuk PPL pendamping dan pengurus gapoktan, pembuatan demplot, menyelenggarakan gelar teknologi dan pendistribusian leaflet dan juknis. Kegiatan ini difokuskan pada komunitas petanian yang banyak diusahakan oleh petani peserta PUAP seperti : Padi, kedelai, jagung, dan kacang tanah. Pelatihan PPL pendamping ditingkat kabupaten/kota lokasi PUAP Tahun 2008 dan 2009 yang terintegrasi dengan Prima Tani dan SL – PTT.

3.3.4. Monitoring dan Evaluasi

Dilaksanakan oleh BPTP melalui kegiatan pertemuan, pengisian form, survey lapangan dan workshop dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pengisian form dilakukan oleh PMT setiap akhir bulan. Isis form monitoring meliputi : (1) perkembangan bulan pelaksanaan PUAP tahun 2008 dan 2009; nilai rekening gapoktan pada akhir bulan, dana kas yang ada pada pengurus, nilai dana yang disalurkan, nilai dana yang sudah dikembalikan oleh petani, jumlah petani penerima dana, jumlah petani yang telah mengembalikan, (2) perkembangan pelaksanaan PUAP yang meliputi : Perkembangan pelaksanaan PUAP yang meliputi : usulan desa dan gapoktan PUAP oleh Bupati, SK Mentan tentang penetapan desa dan gapoktan PUAP, SK Bupati tentang penetapan desa dan gapoktan PUAP, sosialisasi PUAP oleh tim teknis Kabupaten/Kota, pembekalan penyusunan RUB dan administrasi lainnya oleh tim teknis kecamatan dan tim pengarah PUAP, pembuatan rekening Gapoktan, pembuatan RUB dan kelengkapan dokumen lainnya, verifikasi RUB oleh tim teknis kabupaten, pengiriman RUB oleh sekretariat PUAP,

transfer dana BLM ke rekening gapoktan, penyaluran dana kepada petani, pemanfaatan dan menurut jenis usaha agribisnis, peyediaan dan pendukung PUAP.

- b. Pertemuan/diskusi bulanan dengan PMT dilaksanakan setiap awal bulan : materi diskusi meliputi : perkembangan PUAP, masalah yang dihadapi dan upaya pemecahan masalah yang perlu dilakukan.
- c. Survey lapangan dilaksanakan dalam rangka verifikasi masalah yang dilaporkan dalam form monitoring dan evaluasi, dampak pelaksanaan PUAP 2009. survey lapangan diutamakan di kecamatan-kecamatan yang memiliki dsa PUAP relatif banyak.
- d. Workshop evaluasi pelaksanaan PUAP, dilaksanakan oleh tim pelaksana PUAP Provinsi Aceh pada pertengahan tahun dan akhir tahun.

3.4. Waktu dan Lokasi

Kegiatan dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan bulan Desember 2010. Tempat pelaksanaan kegiatan di Provinsi Aceh dialokasikan pada 19 Kabupaten/ Kota yaitu : Kab. Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Bener Meriah , Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Gayo Lues, Aceh Singkil, Subulussalam, Simeulue, Aceh Barat, Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, Aceh Jaya dan Nagan Raya. Kabupaten/Kota tersebut merupakan penerima dana BLM- PUAP tahun 2008 dan 2009.

Kegiatan-kegiatan tersebut diintegrasikan dengan desa/gapoktan lokasi kegiatan Prima Tani, SL-PTT dan PSDS dapat lihat pada table 1. sebagai berikut :

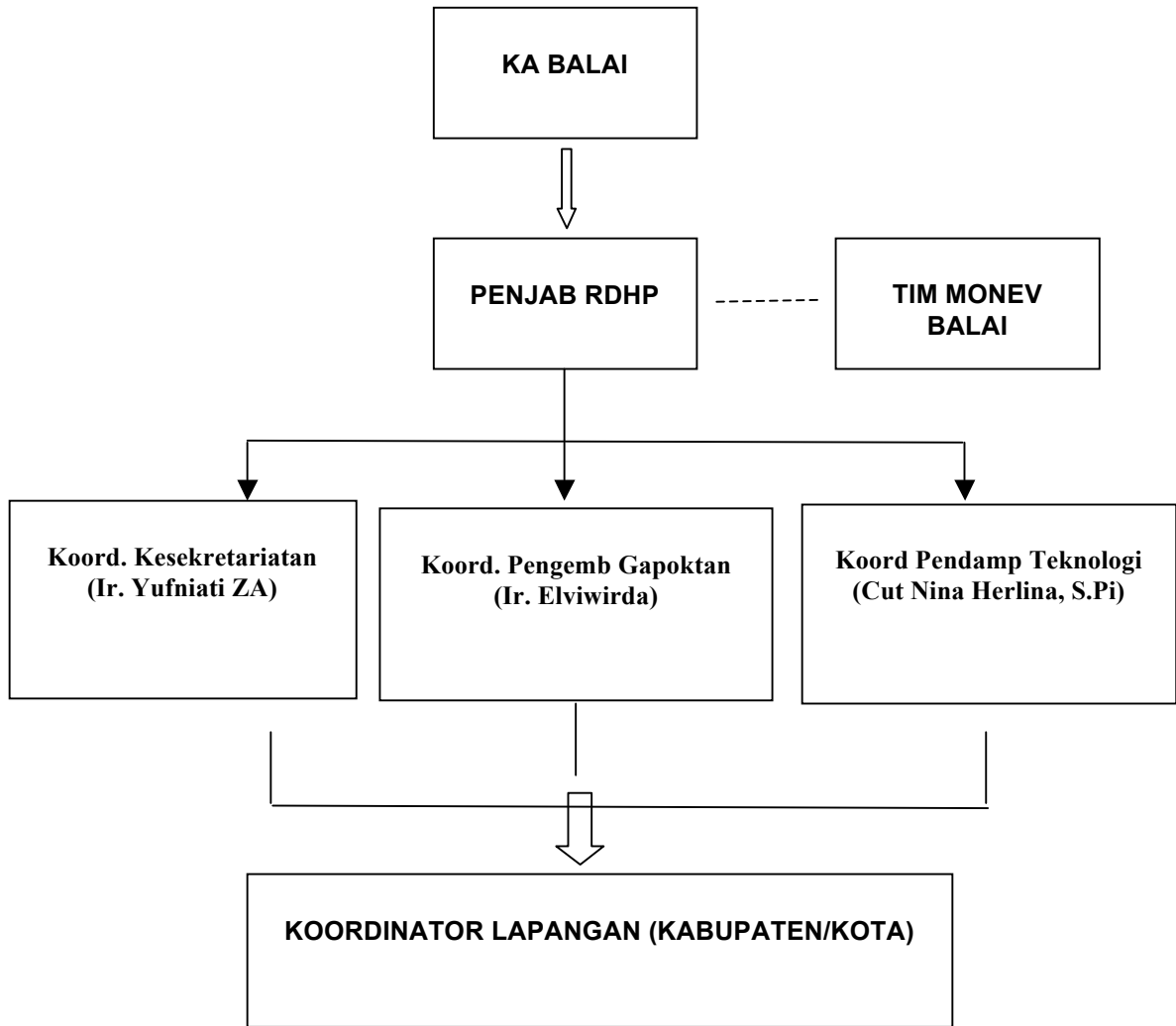
Tabel 1. Integrasi dengan Desa/Gapoktan lokasi kegiatan Prima Tani, SL-PTT dan PSDS

No	Prima Tani			SL-PTT		PSDS	
	Kabupaten	Kec.	Desa	Kec.	Desa	Kec.	Desa
1.	Aceh Besar	1	1	4	12		
2.	Pidie	1	1	3	5	1	1
3.	Pidie Jaya			1	4	1	1
4.	Bireuen						
5.	Aceh Utara			2	2		
6.	Aceh Timur			3	14		
7.	Aceh Tamiang			6	16	1	1
8.	Aceh Singkil			1	2		
9.	Subulussalam						
10.	Aceh Tenggara						
11.	Gayo Lues			4	18		
12.	Bener Meriah	1	1	1	1	1	1
13.	Aceh Tengah						
14.	Aceh Barat			3	12		
15.	Aceh Barat Daya			4	18		
16.	Nagan Raya					1	1
17.	Aceh Selatan			7	21		
18.	Aceh Jaya			3	12	1	1
19	Simeulue			3	7		
	Jumlah		3		143		6

Tabel 2. Koordinator Wilayah/Liason Officer (LO) SL-PTT pada Masing-Masing Kabupaten di Provinsi Aceh

No	Nama Kabupaten	Nama
1	2	3
1	Aceh Besar	Ir. Syarifah Raihanah
2	Pidie	Irhas, A.Md
3	Pidie Jaya	Cut Nina Herlina, S.Pi
4	Bireuen	Ir. Elviwirda
5	Aceh Utara	Ir. Nani Yunizar
6	Aceh Timur	Bardi Ali, S.Pt
7	Aceh Tamiang	Abdul Azis, S.Pi
8	Aceh Tengah	Ir. Khalid
9	Bener Meriah	Ir. Amir Hamzah
10	Aceh Tenggara	M. Ramlan, SP
11	Gayo Luwes	Ir. Basri A. Bakar, M.Si
12	Aceh Jaya	Darmawan, SP
13	Aceh Barat	Ir. Adi Hidayat
14	Nagan Raya	Ir. Anwar Budiman
15	Aceh Barat Daya	Ir. Jamal Khalid
16	Aceh Selatan	Ir. Tamrin
17	Simeulue	M. Yusuf Ali
18	Aceh Singkil	Emlan Fauzi, SP
19	Subulussalam	Zuardi Effendi

Struktur Organisasi Pendampingan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan Di Provinsi Aceh Tahun 2010



KETERANGAN :

Uraian tugas Koordinator Kesekretariatan :

- a. Melaksanakan kesekretariatan PUAP Prov Jateng;
- b. Fasilitasi BOP PMT dan pengelolaan anggaran;
- c. Memfasilitasi pelaksanaan pelaporan e- form PMT;
- d. Melaksanakan verifikasi dokumen pengajuan BLM-PUAP;
- e. Supervisi, monitoring dan evaluasi tugas PMT;
- f. Mengkoordinir dan memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM dan supervisi pelaksanaan PUAP;
- g. Menyusun laporan kegiatan yang dilaksanakan.

Uraian tugas Koordinator Pengembangan Gapoktan :

- a. Merencanakan, dan mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pengembangan Gapoktan baik sebagai pelaksana PUAP maupun dalam rangka meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi Gapoktan menuju terbentuknya LKM Agribisnis;
- b. Memfasilitasi Koordinator Lapangan dalam melaksanakan tugas pendampingan terhadap manajemen kelembagaan Gapoktan
- c. Menyusun laporan kegiatan yang dilaksanakan.

Uraian tugas Koordinator Pendampingan Teknologi :

- a. Melaksanakan analisis kebutuhan dan ketersediaan infotek bagi pelaksana PUAP tingkat lapangan;
- b. Merencanakan dan menyiapkan infotek dalam rangka pengembangan usaha agribisnis baik dalam bentuk tercetak, elektronik maupun media tatap muka;
- c. Memfasilitasi Koordinator Lapangan dalam melaksanakan pendampingan teknologi pengembangan usaha agribisnis terhadap Gapoktan;
- d. Menyusun laporan kegiatan yang dilaksanakan.

Uraian tugas Koordinator Lapangan (Kabupaten/Kota) :

- a. Berkoordinasi dengan Tim Teknis PUAP kabupaten/ kota, PMT, dan pelaksana PUAP di lapangan dalam pelaksanaan PUAP ;
- b. Merencanakan dan menyusun kebutuhan teknologi untuk pendampingan Gapoktan dalam melaksanakan pengembangan usaha agribisnis sesuai RUB di lokasi PUAP;
- c. Sebagai narasumber informasi teknologi yang dibutuhkan GAPOKTAN dalam penyusunan dan pelaksanaan RUB bersama penyuluh pendamping;
- d. Sebagai narasumber dalam pelatihan/apresiasi kepada GAPOKTAN dalam aspek pengembangan pemasyarakatan inovasi teknologi;
- e. Melaksanakan supervisi terhadap pelaksanaan kegiatan PUAP baik dalam pengembangan usaha agribisnis, manajemen kelembagaan Gapoktan maupun pengelolaan keuangan dana PUAP.
- f. Menyusun laporan kegiatan yang dilaksanakan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Laporan tahunan ini menyajikan hasil kegiatan tentang : 1). Penyaluran biaya operasional Penyelia Mitra Tani (BOP PMT); 2). Verifikasi RUB , 3). Pengembangan Gapoktan; 4) Pendampingan Teknologi dan Supervisi pelaksanaan Program PUAP yang meliputi : Koordinasi, supervise, verifikasi dokumen pengajuan BLM-PUAP dan kesekretariatan, B). Fasilitasi pendampingan inovasi teknologi pengembangan usaha agribisnis, C) Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia; 4) Monitoring dan Evaluasi; 5). Pelaporan

4.1. Penyaluran Biaya Operasional Penyelia Mitra Tani (BOP PMT)

Penandatanganan kontrak kerjasama antara Penyelia Mitra Tani (PMT) 2008-2009 dengan Departemen Pertanian cq. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Deptan dilakukan pada tanggal 9 Maret 2010 sebanyak 43 orang di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian NAD.

Adanya penambahan tenaga Penyelia Antar Waktu (PAW) di tahun 2010 sebanyak 7 orang terdiri dari kabupaten Aceh Besar , Pidie Jaya, Aceh Utara, Aceh Tenggara, Aceh Jaya, Aceh selatan dan Simeulu.

Pada 3 Nopember dilakukan penandatanganan kontrak kerjasama antara Penyelia Mitra Tani (PMT) dengan Departemen Pertanian cq. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Deptan oleh 11 orang PMT tahun 2010.

4.2. Verifikasi Dokumen RUB dan Administrasi Pendukung lain

Berdasarkan PEDUM PUAP, RUB disusun oleh Gapoktan berdasarkan Rencana Usaha Kelompok (RUK) dan Rencana Usaha Anggota (RUA). Penyusunan RUB oleh Gapoktan harus memperhatikan kelayakan usaha produktif petani yaitu : Usaha Budidaya dan Usaha non budidaya.

Tahapan penyusunan RUB adalah sebagai berikut :

1. RUB disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi usaha agribisnis di desa PUAP yang dilakukan oleh penyuluh pendamping.
2. RUB Gapoktan sebagai dokumen PUAP disetujui dan disahkan melalui rapat anggota dan selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Gapoktan.
3. RUB yang sudah ditandatangani dikirim ke ketua kab/kota untuk memperoleh persetujuan, serta dilampirkan dokumen administrasi lainnya yaitu : seperti a). Perjanjian Kerjasama, b). Nomor Rekening Gapoktan, c). Kwitansi bermaterai, Rp. 6.000 yang ditandatangani oleh Ketua Gapoktan d). Berita Acara, e). Surat Perintah Kerja (SPK) bermaterai 6000, f) Pakta Integritas, dan g) SK Mentan tahun 2010

Verifikasi awal terhadap RUB dan dokumen administrasi penunjang Gapoktan Tahun 2010 lainnya dilakukan oleh PMT pada tingkat kabupaten/kota. yang selanjutnya diajukan ke Tim Teknis untuk dikirim ke BPTP Aceh untuk diteliti dan diverifikasi. Verifikasi RUB (Rencana Usaha Bersama) untuk 21 kabupaten/kota pada tahap pertama sebanyak 182 RUB, sisanya diselesaikan pada tahap kedua yang diverifikasi sebanyak 178 RUB. Dana BLM yang sudah masuk ke rekening pada SK tahap pertama sebanyak 248 desa/gapoktan dan SK tahap kedua 70 desa/Gapoktan.

4.3 Pengembangan Gapoktan

Kegiatan Pengembangan Gapoktan lokasi PUAP dilaksanakan dalam bentuk Apresiasi LKM-A dan Apresiasi Teknologi yang bertujuan untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan, dan ketrampilan dalam pelaksana pengelolaan keuangan PUAP dan peningkatan ketrampilan di bidang teknologi yang berkaitan dengan usaha produktif di lokasi PUAP. Sasaran kegiatan Apresiasi adalah pengurus Gapoktan dan Penyuluh Pendamping ditetapkan oleh Bupati/ Walikota setempat lokasi PUAP lokasi tahun 2008 dan 2009.

Apresiasi akan dilaksanakan dengan metoda komunikasi tatap muka, diskusi dan partisipatif. Kegiatan ini dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan Tim teknis PUAP kabupaten dan Lembaga Perbankan Syariah.

Kegiatan Apresiasi LKM-A dan Apresiasi Teknologi sudah dilaksanakan di 19 Kabupaten/kota yaitu kabupaten Simeulue, Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireun, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Bener Meriah, Aceh Tengah, Aceh jaya, Aceh Barat, nagan Raya, Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, Subulussalan, Singkil, Aceh Tenggara, dan Gayo Luwes.

Peserta Apresiasi untuk tiap kabupaten rata-rata diikuti oleh 40 peserta. Materi Apresiasi LKM-A yang disampaikan menyangkut tentang pembentukan dan pengembangan LKM-A. Sedangkan materi Apresiasi Teknologi yang disampaikan menyangkut dengan teknologi sesuai kebutuhan di lokasi PUAP diantaranya teknologi, PTT Padi dan kedele.

Respon peserta sangat antusia mengikuti acara, terlihat dari banyaknya tanggapan saat diskusi, dan banyaknya masukan untuk menyamakan persepsi dalam pembentukan LKM-A gapoktan.

4.4. Pendampingan Teknologi dan Supervisi Pelaksanaan Program PUAP

A. Pendampingan Teknologi

Pendampingan teknologi dilakukan melalui kegiatan apresiasi teknologi dengan memperhatikan kebutuhan teknologi bagi anggota gapoktan PUAP di kabupaten/kota. Beberapa kabupaten yang sudah dilakukan apresiasi teknologi yaitu kabupaten Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, , Bireun, Aceh Utara, Singkil, subulussalan, Aceh Selatan, dan Aceh Barat Daya,

Melalui kegiatan pendampingan teknologi dapat memfasilitasi pengembangan agribisnis di lokasi PUAP tahun 2008 dan 2009 yang berintegrasi dengan program Prima Tani, PSDS, dan SL-PTT dengan jumlah seluruhnya 143 desa. Materi yang disampaikan kepada gapoktan peserta apresiasi disesuaikan dengan usaha produktif

yang dilakukan oleh gapoktan. Dengan adanya pendampingan teknologi ini diharapkan petani yang dalam hal ini sebagai anggota gapoktan penerima BLM-PUAP dapat meningkatkan produksi usahatannya.

Di kabupaten Aceh Besar, Pidie dan Pidie Jaya misalnya materi yang disampaikan kepada anggota gapoktan adalah tentang teknologi PTT Padi sawah. Materi yang disampaikan di Kabupaten Subulussaalam dan Singkil adalah PTT Padi dan Jagung. Materi yang disampaikan di kabupaten Aceh Tenggara dan Gayo Luwes adalah PTT Padi, Jagung dan Cabe. Di kabupaten Bireun dan Aceh utara disampaikan materi PTT Padi dan Kedele.

Pendampingan teknologi juga dilakukan melalui pendistribusian materi diseminasi sejumlah 1). 2 judul brosur 1.000 eksemplar (Teknologi Budi daya Cabe Merah dan PTT Kacang Tanah), 2). 4 judul leaflet sebanyak 3.000 eksemplar (Musuh Alami, Membuat Kompos, Teknologi Pupuk Cair dan Pengendalian Keong Mas). Kegiatan apresiasi teknologi ini melibatkan LO yang telah ditunjuk oleh BPTP Aceh.

Pendampingan teknologi juga telah dilakukan di Kabupaten Aceh Jaya. Kabupaten Aceh jaya merupakan salah satu desa binaan kegiatan PUAP yang terdiri dari beberapa Gapoktan salah satu kelompok Gapoktan yang bergerak dibidang peternakan adalah Gapoktan Sape Kheen yang terdiri dari 10 peternak yang bergerak dalam budidaya pengemukan sapi potong hampir 30% dana pinjaman dari PUAP telah dikembalikan kedalam kelompok hampir sebagian besar petani memelihara ternak sapi dan dalam waktu 6 bulan setelah pemelihara mereka memperoleh keuntungan sekitar 3 – 4 juta/ekor hasil dari diskusi dengan ketua kelompok tani Sabee Kheen Desa Lhok Krut Kecamatan Setia Bakti. Disamping itu juga pelaksanaan bimbingan teknologi berupa assement kunjungan ke Exfarn dari Kegiatan Pemda Aceh Jaya yang mendapat bantuan sapi brahman cross dari dana APBN, dimana hasil assement dan Rekomendasi yang diberikan sebagai berikut :

Rekomendasi hasil assessment yang dilakukan oleh BPTP Aceh dengan Staf Ahli Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Aceh Prof. Dr. Drh. H. Jamaan Manan, MS, pada tanggal 22 April 2010 di lokasi peternakan Desa Gampong

Padang – Lageun, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya adalah sebagai berikut :

1. Sapi Brahman Cross yang berada di lokasi tersebut sebanyak 50 ekor, kondisi ternak masih produktif dan sangat layak untuk dikembangkan sebagai pilot project kegiatan sentral breeding sapi potong di masa yang akan datang.
2. Perlu dilakukan pemindahan kandang sebanyak 5 (lima) unit ke lokasi yang tidak tergenang air dengan kapasitas sebagai berikut :
 - Kandang untuk induk sebanyak 2 (dua) unit : 1 (satu) unit untuk induk betina ukuran 1,5 x 2 m/ekor dan 1 (satu) unit untuk induk jantan ukuran 2,10 m x 1,45 m/ekor.
 - Kandang untuk pedet sebanyak 2 (dua) unit dengan ukuran 1,5 m x 1 m/ekor.
 - Kandang untuk induk betina bunting sebanyak 1 (satu) unit dengan ukuran 2,10 m x 1,50 m/ekor.
3. Pembuatan saluran drainase primer dan skunder perlu dilakukan untuk pembuangan air, agar tidak terjadi penggenangan air di lahan yang ditanami rumput.
4. Penanaman rumput unggul diperlukan untuk jenis rumput padang pengembalaan, rumput potong dan penanaman jenis *loguminosa* (batang Pgamal) sebagai berikut :
 - *Brachiaria humidicola* jarak tanam 30 x 30 cm
 - *Brachiaria decumben* jarak tanam 40 x 40 cm
 - *Elephen grass* /rumput gajah jarak tanam 60 x 90 cm
 - *Gliricida maculata* /gamal jarak tanam 1 x 1 meterdengan sistem rotasi grassing untuk pakan hijauan makanan ternak (HMT).
5. Perlu dilakukan pemantauan kesehatan hewan dan pelaksanaan IB secara rutin/terprogram.

B. Supervisi

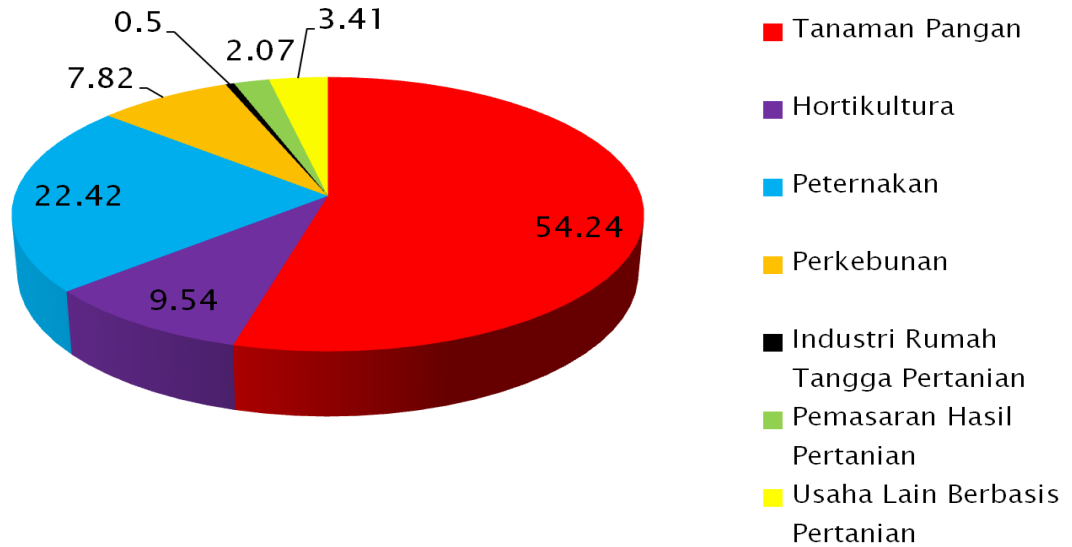
Kegiatan monitoring dan Evaluasi dilakukan melalui kegiatan Supervisi ke lokasi gapoktan PUAP. Dalam tata kelola pelaksanaan program PUAP, Badan Litbang Pertanian melalui Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BBP2TP) dan jajaran Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) mendapat peran strategis dalam pengawalan teknis pelaksanaan di lapangan, diantaranya supervisi pelaksanaan di lapangan.

Dalam rangka menjaga kesinambungan dan keberhasilan pelaksanaan PUAP dilakukan supervisi guna mengetahui perkembangan pelaksanaan, penyaluran dan pemanfaatan dana BLM PUAP. Tujuan supervisi untuk : 1). Melihat sejauhmana meningkatnya kemampuan pelaku usaha agribisnis, pengurus gapoktan, penyuluh pendamping dan PMT; 2). Menilai sejauhmana kemampuan dan peningkatan fungsi kelembagaan ekonomi petani menjadi lembaga keuangan mikro.

Kegiatan supervisi tahun 2010 dilakukan di 19 Kabupaten/kota. Supervisi dilakukan terhadap gapoktan penerima dana BLM PUAP mencakup beberapa aspek ; (1) Profil umum dan keanggotaan gapoktan; (2) Kepengurusan organisasi gapoktan,; (3) Kualitas SDM pengurus gapoktan; (4) Fasilitas organisasi gapoktan; (5) Kinerja gapoktan dan (6)Mekanisme pengusulan dan penyaluran dana BLM-PUAP.

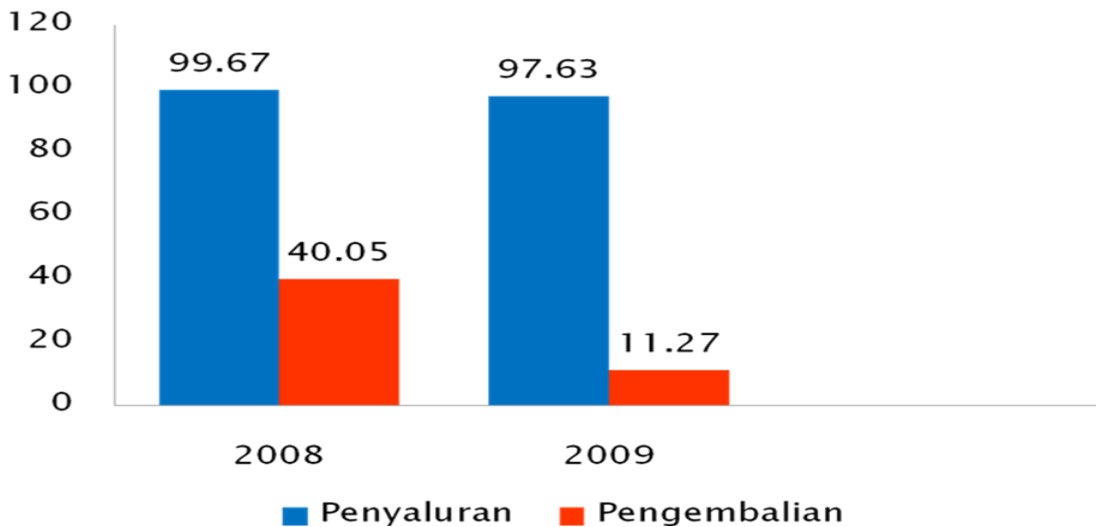
Hasil supervisi menunjukkan bahwa data yang diperoleh untuk penyaluran dana BLM PUAP tahun 2009 yang di gunakan untuk kegiatan usaha produktif tanaman pangan sebesar 54,24 %, Hortikultura 9,54, peternakan 22,42 %, perkebunan 7,82, industri rumah tangga pertanian 0,5 %, pemasaran hasil pertanian 2,57 % dan usaha lain berbasis pertanian 3,41 %. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada diagram berikut ini.

Diagram Persentase Usaha Produktif Gapoktan PUAP Tahun 2009 Provinsi Aceh



Selanjutnya perkembangan dana bLM-PUAP tahun 2008 dan 2009 dapat dilihat pada diagram berikut ini.

GRAFIK PERSENTASE PERKEMBANGAN DANA BLM PUAP TAHUN 2008 DAN 2009 PROVINSI ACEH



Rendahnya pengembalian dana BLM-PUAP 2008 ditingkat Gapoktan disebabkan beberapa hal yaitu :

1. Akibat terjadinya gagal panen, bencana alam dan serangan penyakit ND pada ternak ayam ras.
2. Rendahnya tingkat kemampuan pengurus dalam pengelolaan keuangan.
3. Sebagian masyarakat masih beranggapan dana BLM-PUAP merupakan dana hibah.

Sedangkan untuk dana BLM PUAP 2009 rendahnya pengembalian dikarenakan belum jatuh tempo.

Gapoktan 2008 penerima BLM PUAP yang sudah menuju LKMA sebanyak 35 %, sedangkan gapoktan 2009 akan mengarah mengarah ke LKMA.

V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Penandatanganan kontrak kerjasama antara Penyelia Mitra Tani (PMT) 2008-2009 DAN pmt 2010 dengan Departemen Pertanian cq. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Deptan dilakukan sebanyak 61 orang di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian NAD.
2. Verifikasi RUB (Rencana Usaha Bersama) untuk 21 kabupaten/kota pada tahap pertama sebanyak 182 RUB, sisanya diselesaikan pada tahap kedua yang diverifikasi sebanyak 178 RUB. Dana BLM yang sudah masuk ke rekening pada tahap pertama sebanyak 318 gapoktan.
3. Kegiatan Apresiasi LKM-A dan Apresiasi Teknologi sudah dilaksanakan di 19 Kabupaten/kota yaitu kabupaten Simeulue, Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireun, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Bener Meriah, Aceh Tengah, Aceh jaya, Aceh Barat, nagan Raya, Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, Subulussalan, Singkil, Aceh Tenggara, dan Gayo Luwes.
4. Kegiatan pendampingan teknologi dapat memfasilitasi pengembangan agribisnis di lokasi PUAP tahun 2008 dan 2009 yang berintegrasi dengan program Prima Tani, PSDS, dan SL-PTT dengan jumlah seluruhnya 143 desa.
5. Pendampingan teknologi juga dilakukan melalui pendistribusian materi diseminasi sejumlah 1). 2 judul brosur 1.000 eksemplar (Teknologi Budi daya Cabe Merah dan PTT Kacang Tanah), 2). 4 judul leaflet sebanyak 3.000 eksemplar (Musuh Alami, Membuat Kompos, Teknologi Pupuk Cair dan Pengendalian Keong Mas).

5.2.Saran

1. Program PUAP merupakan program pembayaran masyarakat yang berkelanjutan, tentunya diperlukan pembinaan, monitoring, evaluasi serta pelaporan dari masing-masing Kabupaten/Kota lokasi PUAP.
2. Perlu adanya sharing dana dari masing-masing Kabupaten/kota dalam rangka mendukung program PUAP (pembinaan evaluasi dan pelaporan).
3. Perlu dilakukan penilaian Gapoktan PUAP berprestasi dari masing-masing Kabupaten Kota untuk dapat menjadi Gapoktan/ Desa contoh untuk kelompok yang lain.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Badan Litbang Pertanian. 2007. Rumusan Lokakarya Nasional Akselerasi Diseminasi Inovasi Pertanian Mendukung Pembangunan Berawal dari Desa.

BAPPEDA Prov. Aceh, 2008. Statistik Dalam Angka, Banda Aceh

Departemen Pertanian, 2007. Desain dan Operasional PUAP di 10000 Desa. Departemen Pertanian Republik Indonesia, 13 halaman.

Departemen Pertanian, 2009 Petunjuk Teknis Penyelia Mitra Tani (PMT). Jakarta, 34 halaman.

Departemen Pertanian, 2009. Petunjuk Teknis Penyuluh Pendamping PUAP, Jakarta 16 halaman.

Departemen Pertanian, 2009. Pedoman Umum Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP). Jakarta 16 halaman.